

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 KERANGKA UMUM ANGGARAN NEGARA

Pendahuluan

Fungsi Anggaran

Asumsi dan Prinsip Penyusunan RAPBN

Manfaat Analisa Anggaran

Struktur Anggaran

Struktur Penerimaan Negara

Tinjauan Makro Ekonomi dalam Analisa Anggaran

BAB 2 SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pendahuluan

Jenis Desentralisasi dan Sumber Keuangan Daerah

Seputar Pajak dan Retribusi Daerah

Struktur APBD

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer Lainnya

Struktur dan Kebijakan Dana Desa

vii

ix

1

1

1

2

5

5

6

10

15

15

15

16

20

22

23

25

27

29

BAB 3	ANGGARAN BERBASIS KINERJA (ABK)	33
	Pendahuluan	33
	Pengertian dan Landasan Hukum ABK	33
	Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	33
	Kedudukan ABK dalam Perencanaan Daerah	35
	Hal Baru dalam ABK	35
	Indikator dan Target Kinerja	37
BAB 4	SIKLUS ANGGARAN DAN PENGAWASAN APBD	41
	Pendahuluan	41
	Peraturan Terkait APBD	41
	Siklus Anggaran dan Pengawasan APBD	41
	Paradigma Baru Pengawasan APBD	42
	Peran Publik Pada Tahap Penyusunan Anggaran	43
	Siklus APBD	44
	Objek Pengawasan APBD	48
BAB 5	INDIKATOR KINERJA DAN PENGAWASAN PUBLIK	55
	Pendahuluan	55
	Indikator Kinerja dan Pengawasan Publik	55
	Pengukuran Kinerja dan Manfaat ABK	56
	Aspek-aspek Pengukuran Kinerja	58
	Unsur-unsur Indikator Kinerja	59
	Pengawasan Publik Pada Indikator Kinerja	59
BAB 6	STRATEGI MENILAI APBD	65
	Pendahuluan	65
	Tips Menilai APBD	65
	Strategi Menilai APBD	65
	Masalah-masalah Seputar APBD	66
	Aspek-aspek Penting untuk Dikritisi dalam APBD	67
	Membandingkan Kinerja APBD	67
	Menilai APBD dengan Metode Ratio dan Cara Penyajiannya	67
	Perbandingan Realisasi dengan Target	69
	Penilaian Sisi Prinsip Perencanaan	70
	Menilai Kinerja APBD dari Berbagai Aspek	71
BAB 7	ANGGARAN RESPONSIF GENDER	73
	Pendahuluan	73
	Anggaran Responsif Gender	73

	Gender dan Perbedaan Jenis Kelamin	74
	Proses Perencanaan yang Responsive Gender	76
	Pentingnya Data Terpilah dan Data Pendukung Analisa Gender	77
	Peran DPRD dan Aplikasi Anggaran Responsive Gender	79
	Aplikasi Anggaran Responsive Gender	79
	<i>Budget Policy</i> dalam Anggaran Responsive Gender	81
BAB 8	SEKILAS PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD	85
	Pendahuluan	85
	Program / Kegiatan DPRD	85
LAMPIRAN		99

-oo0oo-

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, pemerintah dalam hal ini Negara dan Daerah memerlukan sumber pembiayaan yang cukup besar. Sumber pembiayaan ini kemudian harus dialokasikan untuk berbagai sektor prioritas dan strategis. Berbagai jenis sumber pembiayaan yang perlu digali secara optimal yang kemudian dialokasikan ke semua sektor melalui suatu proses atau mekanisme pembiayaan negara yang cukup kompleks. Tidak optimalnya penggalan sumber-sumber pembiayaan negara dan daerah akan mengganggu mekanisme pembiayaan secara keseluruhan. Terganggunya proses pembiayaan akan mengganggu pula mekanisme dan pengelolaan keuangan di tingkat daerah, sebab sampai saat ini ketergantungan keuangan daerah terhadap Negara dalam bentuk perimbangan keuangan pusat dan daerah masih cukup tinggi. Kegagalan pada salah satu unsure pengelolaan keuangan negara ini akan mempengaruhi pengelolaan keuangan hingga ke tingkat daerah, kecamatan hingga pada tingkat pemerintahan yang terendah yaitu desa.

Pada bab ini akan diuraikan struktur dan prosedur pembiayaan dalam konteks negara dan struktur dan prosedur pembiayaan dalam konteks daerah serta bagaimana hubungan keduanya. Pada bagian akhir bab ini akan dibahas konsep-konsep dasar yang paling relevan untuk diketahui tentang pembiayaan Negara / daerah.

FUNGSI ANGGARAN

Tujuan pemerintah sangat bersifat politis, dimana setiap pilihan program / kegiatan yang diambil dalam APBD harus memperhatikan preferensi para pemilih (voters) yang memilih orang-orang yang duduk di pemerintahan dan parlemen. Secara fungsional APBD merupakan instrumen